

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Terdapat beberapa fenomena praktik manajemen laba yang pernah terjadi. Salah satu fenomena manajemen laba yang pernah terjadi di luar negeri adalah yang dilakukan oleh PT Toshiba *Corporation*. Pimpinan puncak PT Toshiba *Corporation* terlibat secara sistematis dalam skandal penggelembungan keuntungan perusahaan sebesar 1,2 miliar dollar AS selama beberapa tahun (kompas.com). Berdasarkan hasil investigasi, diketahui tindakan pengelembungan laba tersebut dilakukan karena PT Toshiba telah gagal mencapai target keuntungan bisnis sejak tahun 2008 ditambah lagi krisis global yang melanda pada waktu itu. Tindakan penggelembungan laba tersebut membuat CEO Hisao Tanaka memutuskan untuk mengundurkan diri, selain itu nama Toshiba juga dihapus dari indeks saham dan penurunan penjualan yang signifikan (integrity-Indonesia.com). Kasus serupa juga terjadi di negara Amerika Serikat yaitu kasus pada Enron *Corporation* dan Xerox *Corporation*. Tidak hanya kasus di luar negeri. Terdapat pula kasus praktik manajemen laba yang terjadi di Indonesia.

Kasus manajemen laba yang baru-baru ini dilakukan oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA). Perbedaan informasi antara data internal dengan laporan keuangan 2017 yang telah diaudit memiliki beberapa poin penting. Poin-poin itu diantaranya yang pertama, terdapat dugaan overstatement sebesar Rp 4 triliun pada akun piutang usaha, persediaan dan

aset tetap dan sebesar Rp 662 miliar pada penjualan serta Rp 329 miliar pada EBITDA entitas food. Yang kedua, terdapat dugaan aliran dana sebesar Rp 1,78 triliun dengan berbagai skema dari Grup AISA kepada pihak-pihak yang diduga terafiliasi dengan manajemen lama. Yang ketiga terkait hubungan dan transaksi dengan pihak terafiliasi, tidak ditemukan adanya pengungkapan (*disclosure*) secara memadai kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang relevan (kontan.co.id). Kasus manajemen laba lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Kasus manajemen laba

	Nama Perusahaan	Keterangan	Sumber
1	PT Inovisi Infracom Tbk	Banyaknya kesalahan dalam laporan keuangan yang disajikan	https://m.detik.com/finance/bursa-dan-valas/d-2917159/
2	PT Kimia Farma Tbk	Perbedaan pelaporan laba bersih dalam laporan keuangan yang disajikan	https://davidparsaoran.wordpress.com/2009/11/04/
3	PT Indofarma Tbk	Ketidaksesuaian penyampaian laporan keuangan dengan pasal 69 UU Pasar Modal	https://m.detik.com/finance/bursa-dan-valas/d-238077/
4	PT Agis Tbk	Memberikan informasi laba secara material tidak benar.	https://greatariana.blogspot.com/2013/07/
5	PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	Perbedaan informasi antara data internal perusahaan dengan laporan keuangan tahun 2017	https://m.kontan.id/news/investor-aisa-kasus-aisa-adalah-skandal-dalam-pasar-modal-indonesia/

Kesalahan yang terjadi di PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) terletak pada laporan kuangannya yang tidak sinkron dan banyak salah. Berikut ini kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan PT Inovisi Infracom Tbk: Bagian utang lain-lain kepada pihak terelasi dan pihak ketiga. BEI menilai bagian ini

tidak *tie up* dengan informasi yang disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Bagian aset tetap, BEI menilai saldo awal aset tetap pada LK Tahunan 2013 hasil audit. Bagian laba bersih per saham, BEI menemukan perusahaan menggunakan “laba periode berjalan”, seharusnya menggunakan “laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk” saja sehingga *overstated*. Bagian pembayaran kas kepada karyawan, BEI menemukan adanya salah kaji, karena berdasarkan LK Tengah Tahunan pembayaran kas kepada karyawan mencapai Rp 1,91 triliun, tapi pada periode kuartal III-2014 turun menjadi hanya Rp 59 miliar. Perusahaan menyatakan seharusnya tertulis Rp 1,9 miliar bukan triliun. Bagian penerimaan (pembayaran) bersih utang pihak berelasi (laporan arus kas), BEI menemukan adanya indikasi salah kaji. Berdasarkan laporan posisi keuangan, pelunasan utang berelasi Rp 124 miliar, tapi di laporan arus kas hanya diakui pembayaran Rp 108 miliar. Bagian laporan segmen usaha, BEI menyatakan perusahaan tidak dapat mengalokasikan 45,5% asetnya kepada masing-masing segmen usaha. Bagian jumlah kewajiban, BEI menyatakan bagian ini tidak *tie up* dengan laporan posisi keuangan. Bagian kategori instrumen keuangan, BEI menyatakan bagian ini tidak *tie up* dengan laporan keuangan tahunan hasil audit (detik.com).

Permasalahan yang terjadi di PT Kimia Farma Tbk terletak pada pelaporan laba bersih perusahaan. Manajemen Kimia Farma melaporkan laba bersih sebesar Rp 132 miliar dan sudah diaudit. Namun, Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang, keuntungan yang sebenarnya

hanya sebesar Rp 99,56 miliar atau lebih rendah sebesar Rp 32,6 miliar atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan lainnya terletak pada persediaan. Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. Sedangkan kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan, sehingga tidak berhasil dideteksi. Berdasarkan penyelidikan Bapepam, bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Selain itu KAP tersebut juga membantu manajemen melakukan kecurangan tersebut (davidparsaoran.wordpress.com)

Lain halnya dengan kasus di PT Indofarma Tbk. Bapepam menjelaskan, kasus ini bermula dari adanya penelaahan Bapepam mengenai dugaan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal terutama berkaitan dengan penyajian laporan keuangan yang dilakukan PT Indofarma sendiri. Dari hasil penelitian, Bapepam menemukan bukti-bukti diantaranya, nilai barang dalam proses dinilai lebih tinggi dari nilai yang seharusnya (*overstated*). Akibatnya harga pokok penjualan mengalami *understated* dan laba bersih mengalami *overstated*. Bapepam menilai ada ketidaksesuaian penyampaian laporan keuangan dengan pasal 69 UU Pasar Modal (detik.com).

Pada kasus PT Agis Tbk, BEI hanya meminta perusahaan itu menyampaikan informasi kepada publik. Namun, Direktur Utama PT Agis Tbk saat itu didenda sebesar Rp 5 miliar karena pemberian informasi yang secara

material tidak benar. Pada tahun 2007, PT Agis Tbk pernah tersandung kasus saham. Saham PT Agis Tbk tiba-tiba anjlok. Setelah ditelusuri, ternyata hal ini terjadi karena adanya pemanipulasian saham yang dilakukan oleh broker. Caranya adalah dengan titip jual saham. Sebenarnya titip jual beli saham ini dilarang oleh BEI, tapi dilanggarnya (greatariana.blogspot.com).

Beberapa kasus mengenai manajemen laba diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen laba merupakan upaya manajer perusahaan untuk mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja perusahaan (Sulistyanto, 2008). Pengertian lain dari manajemen laba adalah suatu tindakan manajer yang memilih kebijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan yang spesifik dan kebijakan akuntansi yang dimaksud adalah penggunaan akrual dalam menyusun laporan keuangan (Dananjaya dan Ardiana, 2016). Manajemen laba merupakan upaya yang dilakukan pihak manajemen untuk melakukan intervensi dalam penyusunan laporan keuangan dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri, yaitu pihak perusahaan yang terkait (Aditama dan Anna, 2014 dalam Putra *et al*, 2019).

Manajemen laba dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam penggunaan dasar akrual oleh pihak manajemen disaat penyusunan laporan keuangan sehingga manajemen dapat mengatur laba dengan cara menaikkan, menurunkan atau meratakan laba (Dananjaya dan Ardiana, 2016). Pihak manajemen seringkali memanipulasi laporan keuangan agar terlihat baik oleh pihak eksternal dimana perusahaan yang mempunyai laba yang kecil direkayasa menjadi lebih besar agar terlihat baik oleh pihak eksternal dan

perusahaan yang mempunyai laba yang besar direkayasa menjadi lebih kecil agar pajak tangguhan yang harus dibayarkan oleh perusahaan dibayar seminimal mungkin.

Pajak tangguhan diatur dalam PSAK Nomor 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan (Suandy, 2011:99). Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam PSAK Nomor 46 menggunakan dasar akrual yang mengatur pajak penghasilan yang kurang bayar atau tertutang dan mengakui kewajiban dan aset pajak tangguhan terhadap konsekuensi pajak periode mendatang, atas transaksi yang telah diakui sebagai laba komersial tetapi belum diakui sebagai laba fiskal atau sebaliknya (Waluyo, 2012:269).

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Pada prinsipnya pajak tangguhan merupakan dampak dari PPh dimasa yang akan datang yang disebabkan perbedaan temporer (waktu) antara perlakuan akuntansi dan perpajakan. Hal ini dapat memberikan kebebasan manajemen dalam menentukan pilihan kebijakan akuntansi dalam menentukan besarnya beban pajak tangguhan (Lubis dan Suryani, 2018).

Beban pajak tangguhan adalah jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang muncul akibat adanya pengakuan atas kewajiban atau aset pajak tangguhan (Waluyo, 2012:272). Sedangkan pengertian lain dari beban pajak tangguhan merupakan beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi yang disusun berdasarkan SAK dengan laba fiskal yang disusun berdasarkan peraturan perpajakan (Sumomba, 2010 dalam Putra *et al*, 2019).

Pada tahun 2018, pendapatan negara dari penerimaan pajak yaitu sebesar 94,00% dari total pendapatan negara (kontan.co.id). Sehingga, penerimaan pajak negara merupakan hal yang sangat penting untuk keberlangsungan ekonomi suatu negara. Pengungkapan pajak penghasilan pada laporan keuangan sangat dibutuhkan untuk berbagai alasan diantaranya adalah untuk penaksiran manajemen laba (Philips *et al*, 2003 dalam Putra *et al*, 2019).

Dengan adanya keinginan pihak manajemen untuk menekan dan membuat beban pajak sekecil mungkin, maka pihak manajemen cenderung untuk meminimalkan pembayaran pajak. Upaya untuk meminimalkan pajak secara eufimisme ini sering disebut dengan perencanaan pajak (Suandy, 2011:1). Perencanaan pajak adalah suatu upaya agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien (Pohan, 2015 dalam Yunila dan Aryati, 2018). Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Dengan melakukan perencanaan pajak, perusahaan berharap untuk dapat meminimalisir atau meminimumkan pembayaran pajak bagi perusahaan dengan cara yang tepat dan legal.

Selain beban pajak tanggungan dan perencanaan pajak, variabel lain yang diteliti sebagai faktor yang mempengaruhi manajemen laba adalah kepemilikan manajerial. Secara teoritis, pihak manajemen yang dalam kepemilikan saham memiliki persentase yang tinggi akan bertindak seperti orang yang memiliki kekuasaan (Astari dan Suryanawa, 2017 dalam Zakia *et al*, 2019). Kepemilikan oleh manajemen yang besar akan efektif memonitoring aktivitas perusahaan. Ketika kepemilikan saham oleh

manajemen rendah maka ada kecenderungan akan terjadinya perilaku *opportunistic* manajer yang akan meningkat juga (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Khuwailid dan Hidayat, 2017). Dengan adanya kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan maka dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham lainnya sehingga permasalahan antara agen dan prinsipal diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham.

Struktur kepemilikan lainnya yaitu kepemilikan institusional yang juga dianggap dapat digunakan oleh perusahaan sebagai alat monitoring yang efektif. Menurut Faizal dalam Khuwailid dan Hidayat (2017), perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen. Adanya kepemilikan institusional yang tinggi membatasi manajer untuk melakukan manajemen laba (Dananjaya dan Ardiana, 2016).

Penelitian tentang pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba sudah pernah dilakukan oleh Putra *et al* (2019) yang menyatakan bahwa beban pajak tangguhan memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin besar beban pajak tangguhan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia maka semakin besar pula peluang perusahaan melakukan praktik manajemen laba (Putra *et al* 2019). Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari *et al*

(2019) yang menyimpulkan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Namun, tidak sejalan dengan penelitian Lubis dan Suryani (2018) yang menyatakan bahwa beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yunila dan Aryati (2018) perencanaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra *et al* (2019) yang menyatakan bahwa secara parsial perencanaan pajak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba dan konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Lubis dan Suryani (2018) yang menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Sari *et al* (2019) yang menyimpulkan bahwa Perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Marini (2017) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh tidak signifikan terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dananjaya dan Ardiana (2016) yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan pada manajemen laba. Khuwailid dan Hidayat (2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional mampu memoderasi hubungan antara kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba aktual.

Hal ini sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut, karena adanya hasil penelitian yang berbeda-beda. Selanjutnya bagaimana jika beberapa variabel

tersebut diteliti kembali untuk melihat hasil yang terbaru. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Khuwailid dan Hidayat (2017), perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya meneliti di perusahaan pertambangan sektor minyak dan gas bumi. Namun, penelitian sekarang meneliti di perusahaan manufaktur, karena perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang diminati banyak investor dibandingkan dengan perusahaan lain dan perusahaan manufaktur rentan sekali terhadap praktik manajemen laba. Perbedaan lainnya yaitu pada tahun penelitiannya. Jika penelitian sebelumnya meneliti selama empat tahun dari tahun 2011-2015, penelitian yang dilakukan sekarang pada tahun 2015-2018.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH BEBAN PAJAK TANGGUHAN, PERENCANAAN PAJAK, KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP MANAJEMEN LABA DENGAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba?
2. Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba?
4. Apakah kepemilikan institusional memoderasi hubungan antara beban pajak tangguhan dengan manajemen laba?

5. Apakah kepemilikan institusional memoderasi hubungan antara perencanaan pajak dengan manajemen laba?
6. Apakah kepemilikan institusional memoderasi hubungan antara kepemilikan manajerial dengan manajemen laba?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba.
- b. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba.
- c. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba.
- d. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional sebagai pemoderasi hubungan antara beban pajak tangguhan dengan manajemen laba.
- e. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional sebagai pemoderasi hubungan antara perencanaan pajak dengan manajemen laba.
- f. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional sebagai pemoderasi hubungan antara kepemilikan manajerial dengan manajemen laba.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan perkembangan ilmu pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Jurusan Akuntansi khususnya dan menambah wacana bagi dunia akademik tentang kajian praktik manajemen laba dan sebagai pengembangan ilmu tentang akuntansi keuangan dari penelitian sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

- a. Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Peradaban.
- b. Penelitian ini dapat digunakan untuk menerapkan teori yang telah diperoleh penulis dibangku kuliah dan untuk menambah dan memperluas pengetahuan.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan perusahaan dalam menilai kinerja manajemen dan sebagai pertimbangan agar dapat mengambil keputusan yang tepat atas laporan keuangan perusahaan.

3. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai suatu informasi dan referensi bagi para investor mengenai pengaruh tingkat manajemen laba sehingga dapat menjadi informasi untuk pengambilan keputusan dalam berinvestasi.

4. Bagi Pembaca

- a. Memberikan sumbangan pikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi keuangan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya untuk mengembangkan dan menyempurnakan penelitian ini agar lebih baik di masa mendatang.

5. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi kepada masyarakat mengenai tingkat manajemen laba yang terjadi di Indonesia.